

Seminar Nasional Dan Rapat Kerja Nasional II
Ikatan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan Indonesia

**MEMBANGUN POLA KESELARASAN PETANI
BERWAWASAN AGRIBISNIS SEBAGAI SOLUSI
TERPINGGIRKAN DAN TERPURUKNYA SEKTOR
PERTANIAN**

Oleh : Dr. Ir. Yuli Hariyati, MS

Fakultas Ekonomi Universitas Jember
Jember, 23 – 27 Mei 2004

Seminar Nasional Dan Rapat Kerja Nasional II
Ikatan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan Indonesia

**MEMBANGUN POLA KESELARASAN PETANI
BERWAWASAN AGRIBISNIS SEBAGAI SOLUSI
TERPINGGIRKAN DAN TERPURUKNYA SEKTOR
PERTANIAN**



Oleh : Dr. Ir. Yuli Hariyati, MS

Asal :	Hadiah Pembelian	Klass R
Terima Tgl :	17 NOV 2009	338.1
Jumlah Eks :	2 EM	HAR m
Pengkatalog :	may	c.1

AGRICULTURAL DEVELOPMENT PROJECTS

Fakultas Ekonomi Universitas Jember
Jember, 23 – 27 Mei 2004

MEMBANGUN POLA KESELARASAN PE'ANI BERWAWASAN AGRIBISNIS SEBAGAI SOLUSI TERPINGGIRKAN DAN TERPURUKNYA SEKTOR PERTANIAN *

Oleh : Dr. Ir. Yuli Hariyati, MS**

I. Pendahuluan

Ekonomi Indonesia telah mengalami pertumbuhan pesat sejak PJP I, walaupun beberapa tahun terakhir ini gerak tersebut nampak melambat. Perkembangan ekonomi ini juga disertai dengan perubahan struktur ke arah lebih non agraris. Peranan sektor industri dan jasa meningkat secara cukup berarti, sementara sektor pertanian secara relatif mengalami penurunan kontribusi dalam produk nasional. Pergeseran peranan sektoral ini juga diikuti dengan perubahan kemampuan dalam menyerap tenaga kerja. Daya serap sektor pertanian melemah dan posisinya secara bertahap diambil alih sektor non pertanian.

Sejalan dengan tahapan dan keberhasilan pembangunan ekonomi yang telah dicapai selama 25 tahun era Orde Baru, proses transformasi struktural perekonomian nasional telah dan akan terus berlanjut mengarah pada struktur perekonomian yang semakin berimbang seperti yang dicita-citakan. Transformasi tersebut telah mengakibatkan terjadinya pergeseran struktur ekonomi dimana peran relatif pertanian dalam perekonomian nasional agak menurun, karena semakin kecil sumbangan terhadap PDB nasional, penyerapan tenaga kerja dan ekspor bahan mentah, diimbangi oleh perkembangan yang pesat di sektor industri manufaktur dan jasa.

Secara nasional, pembangunan yang sedang berlangsung dewasa ini dicirikan oleh adanya berbagai tujuan, sebagaimana tersirat di dalam Garis-saris Besar Haluan Negara. Tujuan-tujuan pembangunan nasional tersebut mencakup beberapa aspek, yaitu aspek pertumbuhan ekonomi, aspek pemerataan pendapatan masyarakat dan aspek kesempatan kerja serta kelestarian sumberdaya potensial.

* Makalah disampaikan Seminar Nasional dan Rapat Kerja Nasional II HMJ IESP

** Staf Pengajar pada Jurusan Sosek Fakultas Pertanian Universitas Jember

Diantara sumberdaya potensial (Randall, 1981) tersebut, ada yang berupa sumberdaya alam (*natural resources*), sumberdaya manusia (*human resources*) dan sumberdaya buatan (*man-made resources*). Sejalan dengan kerangka tujuan tersebut, maka upaya-upaya pembangunan sumberdaya yang dapat dipandang sebagai bagian integral dari pada pembangunan nasional seyogyanya juga memperhatikan aspek-aspek tujuan pembangunan nasional itu sendiri. Ini berarti bahwa upaya tersebut perlu dilakukan secara rasional dan bijaksana.

Pembangunan ekonomi nasional di era ini dititikberatkan pada pemantapan pengembangan industri nasional dengan penguatan dan pendalaman struktur industri yang didukung oleh kemampuan teknologi yang semakin meningkat, peningkatan ketangguhan pertanian, pemantapan sistem kelembagaan koperasi, penyempurnaan pola perdagangan, jasa dan sistem distribusi dan pemanfaatan secara optimal dan tepat guna faktor produksi dan sumberdaya ekonomi serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai prasyarat terbentuknya masyarakat industri yang menjamin peningkatan keadilan, kemakmuran dan pemerataan pendapatan serta peningkatan kesejahteraan rakyat, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Tantangan eksternal perekonomian yaitu perdagangan dunia dalam era globalisasi membawa dampak yang cukup besar baik di negara maju maupun negara sedang berkembang seperti Indonesia. Usman, 1996 menyatakan bahwa muncul kecenderungan perdagangan dunia sepuluh tahun kedepan, diantaranya : (1) pangsa perdagangan bahan mentah terus menurun sedangkan pangsa pasar produk manufaktur masih akan terus meningkat, (2) perdagangan produk manufaktur semakin terkonsentrasi pada mesin, alat pengangkutan, alat komunikasi dan termasuk komponen-komponennya, (3) perdagangan antar-industri semakin penting peranannya, (4) pangsa perdagangan yang berkaitan dengan investasi asing langsung naik, terutama yang merupakan perdagangan intra-perusahaan, (5) peranan perdagangan antar negara industri masih dominan dalam perdagangan dunia, (6) pangsa pasar kawasan Asia Timur akan terus menguat dan (7) kegiatan perdagangan intra-kawasan akan naik lebih cepat dibandingkan dengan perdagangan extra-kawasan.

Pada era tersebut sektor pertanian sebagai salah satu pendukung perekonomian nasional akan senantiasa dituntut untuk dapat menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan strategik dan kondisi sumberdayanya sehingga tetap dapat mempertahankan peran strategisnya. Selama Pembangunan Jangka Panjang Pertama (PJP I) sektor pertanian telah berperan sangat penting dalam pembangunan nasional, khususnya dalam mendukung ketangguhan ekonomi nasional. Dalam kurun waktu tersebut pertanian mampu menjadi katup pengaman dalam penyediaan sebagian besar kesempatan kerja, peningkatan pendapatan rumah tangga, peningkatan penerimaan devisa, dan penyediaan pangan yang cukup bagi seluruh penduduk, dengan tercapainya swasembada beras pada tahun 1984.

Peran pertanian yang sangat penting tersebut akan semakin diuji pada masa mendatang, khususnya dalam menghadapi tuntutan dan perkembangan global dan semakin terbatasnya sumberdaya alam yang selama ini merupakan input fisik yang masih sangat mudah diperoleh. Tugas berat pertanian itu hanya akan dipikul manakala pertanian dapat terus tumbuh secara akseleratif. Sementara itu potret yang ada mencatat bahwa pertumbuhan sektor pertanian relatif lambat dan transformasi struktur perekonomian dari dari yang basis pertanian ke industri belum diikuti oleh pergeseran penyerapan tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri. Peran relatif sektor pertanian terhadap PDB telah menurun dari 24,01 persen pada 1983 menjadi 17,88 persen pada 1993 dan diperkirakan akan terus menurun hingga 12,03 persen pada 2003. Sebaliknya, sumbangan sektor industri ke PDB meningkat dari 11,14 persen pada 1983 menjadi 22,30 pada 1993 dan diperkirakan sebesar 41,03 persen pada 2003. Dalam pada itu, penyerapan tenaga kerjanya relatif tidak seimbang, yaitu 54,66 persen pada 1983 menjadi 50,59 persen pada 1993 di sektor pertanian dan dari 10,02 persen pada 1983 menjadi "hanya" 11,63 persen di sektor industri. Keadaan ini menyebabkan terus berkembangnya *dualisme* atau kesenjangan, baik sektoral, spasial, maupun pelaku-pelaku di sektor pertanian. Sementara itu perkembangan lingkungan global strategik menghendaki pula adanya penyesuaian strategi pengembangan sektor pertanian.

Masa lalu memberikan gambaran bahwa meskipun lebih dari tiga dekade, tetapi potret pertanian masih tetap belum berubah (Muhtadi, 1999). Sektor pertanian masih menjadi tumpuan dimana sampai dengan tahun 1995 sekitar 44 %; tahun 1997 40,73% tenaga kerja terkonsentrasi di sektor pertanian. Sementara sumbangannya terhadap PDB semakin menurun menjadi sekitar 17,3% di tahun 1994 dan 14,81 % di tahun 1997. Kondisi ini selain memberikan gambaran bahwa produktivitas tenaga kerja di sektor pertanian masih rendah, juga memberikan gambaran bahwa sektor pertanian masih merupakan sektor yang “berkewajiban” menghidupi sebagian besar rakyat Indonesia.

Tulisan ini mengkaji “perjalanan” pembangunan pertanian yang terkesan terpinggirkan. Kebijakan dalam pembangunan nasional seolah selalu menempatkan pertanian pada posisi yang diperhatikan, namun dalam kenyataan membuktikan bahwa pertanian menjadi sektor yang inferior dalam pengembangannya. Dampak factor internal (dalam negeri) ditunjang factor eksternal berdampak pada keterpurukan pertanian yang pada gilirannya menurunkan kesejahteraan petani.

II. Sektor Pertanian “Terpinggirkan”

Ditengarai pada umumnya di negara-negara yang sedang berkembang kebijakan menunjukkan telah “menganaktirikan” sektor pertanian. Sebaliknya di negara maju hal ini tidak terjadi, dimana pertanian sangat dilindungi suatu misal dengan adanya argumen *multifunctional*. Di Indonesiapun terlihat adanya kecenderungan bahwa sektor pertanian dituntut untuk menghasilkan produksi dengan harga murah dan stabil untuk mempertahankan variabel-variabel makro seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, trade balance dan sebagainya. Sektor pertanian dituntut mendukung industri dengan menyediakan bahan baku, dan menyediakan pangan murah bagi penduduk di kota.

Kebijakan yang mempengaruhi kesejahteraan petani justru ditentukan oleh sektor luar pertanian, utamanya makro dan perdagangan. Dari segi makro kebijakan terkait langsung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ditunjang dengan peran-peran lembaga terkait (BRI, Bulog, Koperasi). Sepertai contohnya

kebijakan tentang harga (gabah, misalnya) ternyata tidak dapat berjalan lancar dikarenakan “macetnya” fungsi salah satu lembaga. Kebijakan perdagangan yang umum diterapkan di sektor pertanian adalah pengenaan pajak ekspor yang tinggi sementara pajak impor relatif lebih kecil. Pada saat devaluasi sebenarnya suatu kesempatan bagi produk pertanian untuk melakukan ekspor. Hal ini tidak dapat dilakukan dikarenakan adanya kebijakan pajak ekspor yang tinggi dengan suatu dalih agar kebutuhan dalam negeri tercukupi. Devaluasi merupakan insentif bagi komoditas substitusi impor seperti komoditas pangan, yang sampai saat ini masih diimpor. Akan tetapi untuk komoditas ini bea masuk sangat minim, sehingga tidak merangsang produksi. Suatu contoh kasus di Indonesia untuk komoditas beras, gula maupun bawang merah yang kebanjiran impor akibat minimnya perlindungan terhadap produk-produk lokal. Jadi *regime* perdagangan lebih merangsang impor daripada ekspor dan umumnya tidak kondusif terhadap kesejahteraan petani. Persentase anggaran untuk pembangunan di sektor pertanian dari tahun ke tahun ternyata relatif kecil, yaitu hanya berkisar 3% dari keseluruhan anggaran sementara sektor pertanian masih berperan “menghidupi” cukup banyak masyarakat Indonesia.

Pada kebijakan tingkat makro ekonomi dapat dilihat bahwa, sekurang-kurangnya hingga akhir PJP I, sektor pertanian hampir tidak mendapat perhatian secara proporsional. Hal ini terbukti dari strategi industrialisasi yang dianut selama ini tidak memihak pada sektor pertanian, terlihat dari :

Pertama, kebijakan industrialisasi lebih mengarah pada industri berbasis impor dan berorientasi pada pasar luar negeri yang kurang bisa dinikmati oleh bangsa Indonesia namun banyak menyerap penanaman modal yang ada.

Terdapat sekelompok masyarakat (pro-reformasi) yang mempunyai pandangan bahwa pembangunan ekonomi di masa lalu telah keliru dan merupakan penyebab terjadinya krisis ekonomi yang kemudian meluas menjadi multikrisis. Para spekulator valas hanyalah pemicu, karena spekulator hanya bersedia menggoyang perekonomian yang sudah keropos. Strategi pembangunan ekonomi di masa lalu yang mengutamakan pengembangan industri-industri berbasis bahan baku impor, pembiayaan pembangunan terlalu mengandalkan utang luar negeri beserta kebijakan

ekonomi makro pendukungnya merupakan penyebab krisis ekonomi di Indonesia. Kebijakan nilai tukar rupiah yang *over valued* untuk mendukung industri-industri berbasis impor telah menyebabkan tertekannya perkembangan sektor pertanian (merupakan kegiatan sebagian besar rakyat), merapuhkan sistem ketahanan pangan, defisit transaksi berjalan sehingga harus ditutup dengan pemasukan modal (capital inflow) melalui kenaikan suku bunga domestik (Saragih, 2000).

Ditengarai bahwa pembangunan sektor industri kurang bisa dinikmati oleh bangsa Indonesia namun banyak menyerap penanaman modal yang ada. Sementara sektor pertanian yang sampai saat ini masih menjadi sumber mata pencaharian utama bagi rakyat Indonesia utamanya mereka yang ada di pedesaan hanya memperoleh porsi modal yang relatif kecil. Data menunjukkan selama tahun 1994 hingga tahun 1999 telah terjadi penurunan porsi Penanaman Modal Dalam Negeri yang diperuntukkan sektor Pertanian sementara sektor Industri menunjukkan kenaikan porsi penggunaan PMDN. Rata-rata PMDN di sektor pertanian 11,60% sementara sektor industri sebesar 68,28%.

Sektor pertanian semakin menurun pertumbuhan penanaman modal dalam negeri utamanya terjadi pada tahun 1999 yaitu hanya sekitar 2 078,1 milyar rupiah atau 4,19% dari total modal. Industri mengalami kenaikan penanaman modal cukup mencolok antara tahun 1997 – 1999. Hal ini sangat mungkin bahwa pada tahun tersebut pemerintah ingin mengembalikan perekonomian melalui peningkatan ekspor industri termasuk ekspor industri yang berbahan baku dari pertanian (agroindustri). Selain itu produk industri lebih mempunyai pasar yang relatif lebih luas dari pada pasar produk pertanian, sehingga dalam waktu singkat ekspor produk industri mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Dana PMA menunjukkan fluktuasi yang menarik dimana sektor pertanian hanya mendapat rata-rata sebesar 4,0% dan industri 65,76%. Penggunaan dana PMA terbesar untuk sektor industri terjadi di tahun 1994 sebesar 78,98% sedangkan penggunaan terkecil PMA untuk sektor pertanian terjadi tahun 1997 yaitu sebesar 1,37%. Hal ini menunjukkan bahwa investor luar masih belum tertarik menanamkan modalnya di sektor pertanian. Selain adanya gejolak politik, faktor penyebab lainnya

adalah tidak stabilnya tingkat harga, rendahnya penguasaan teknologi serta jaminan pasar yang berubah-ubah.

Kesulitan bagi pertanian untuk memperoleh penanaman modal asing dalam jumlah besar disebabkan kurang tertariknya investor asing pada komoditas pertanian di Indonesia. Kesesuaian iklim di Indonesia untuk sebagian besar komoditas belum menjamin tingginya minat investor untuk menanamkan modalnya. Investor lebih tertarik pada aktivitas-aktivitas yang walaupun proses produksinya harus menggunakan bahan impor tetapi lebih mempunyai peluang pasar baik domestik maupun internasional. Akibatnya hasil pembangunan selama ini lebih banyak dirasakan oleh orang-orang diluar Indonesia, apakah mereka pengkonsumsi produk ataupun mereka produsen bahan baku industri yang diimpor.

Kunci utama ekspor yang *sustainable* dari produk pertanian terletak pada tiga hal, yaitu efisiensi, mutu dan ketersediaan barang. Dengan efisiensi yang tinggi, barang yang dihasilkan akan memiliki biaya produksi rendah sehingga akan kompetitif di pasaran dunia. Membaiknya sektor non pertanian bisa jadi karena besarnya support pemerintah untuk sektor tersebut. Sesuatu yang kurang menggembirakan adalah semakin tingginya impor produk-produk pertanian dari tahun ke tahun menjelaskan bahwa sebegitu besar ketergantungan Indonesia pada produk pertanian luar negeri. Bisa jadi hal ini sebagai akibat kecilnya perhatian pemerintah kepada pertanian utamanya dalam penanaman modal baik modal dalam negeri maupun modal asing.

Data menunjukkan bahwa rata-rata impor produk pertanian bekisar antar 30,73% sedangkan sektor non pertanian sekitar 69,27% antara tahun 1995 sampai tahun 1999. Besarnya impor di sektor non pertanian berkonsekuensi besarnya ekspor pada sektor tersebut. Kondusifnya sektor non pertanian (khususnya industri) adalah dimilikinya kualifikasi tenaga kerja yang lebih baik dari pada sektor pertanian.

Kedua, kebijakan industrialisasi mengutamakan teknologi canggih berbasis impor, berkonsekuensi dibutuhkan tenaga kerja berkualitas.

Dengan satu kata kunci di era globalisasi mendatang yaitu efisiensi, maka industri mengefisienkan proses produksinya dengan mengintensifkan tenaga kerja

(*labor intensive*). Hal ini berkonsekuensi industri hanya membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah yang terbatas dan berkualitas. Kondisi ini dapat disadari karena untuk mencapai tingkat efisiensi yang tinggi maka industri haruslah lebih banyak menggunakan teknologi yang canggih dengan operator atau tenaga kerja yang trampil pula. Sebagai akibatnya, banyak tenaga kerja ber-skill rendah tidak terserap di industri dan mereka kembali “memenuhi” sektor pertanian.

Sektor pertanian relatif lebih mudah dimasuki oleh tenaga kerja dikarenakan tidak adanya spesialisasi pekerjaan maupun persyaratan khusus bagi tenaga kerja. Rendahnya rata-rata tingkat pendidikan tenaga kerja di sektor pertanian berakibat tersendatnya pelaksanaan alih teknologi atau perubahan teknologi.

Apabila dilihat dari tingkatan pendidikannya, ternyata sekitar 59,65% penduduk berpendidikan SD di tahun 1990 berada di pertanian dan menjadi 53,22% di tahun 1997. Di sektor industri hanya sedikit tenaga kerjanya berpendidikan SD yaitu sekitar 15,67% di tahun 1990 dan sedikit meningkat menjadi 17,43% di tahun 1997. Sementara sektor jasa cukup membantu dalam penyerapan tenaga kerja berpendidikan rendah walaupun tidak setingkat dengan sektor pertanian, menyerap tenaga kerja berpendidikan SD sekitar 24,68% di tahun 1990 dan meningkat menjadi 29,36% di tahun 1999. Kondisi menurunnya tenaga kerja berpendidikan SD di sektor pertanian dan bergeser ke sektor jasa menunjukkan bahwa sektor industri tidak mampu menyerap kelebihan tenaga kerja dari sektor pertanian. Walaupun “perhatian” telah dipusatkan pada sektor ini tetapi kondisi *labor intensif* membuatnya tidak mampu mentransfer tenaga kerja berpendidikan rendah. Pemilihan pengembangan industri yang semata-mata meningkatkan devisa tetapi kurang mampu menyerap tenaga kerja kelihatannya kurang cocok diterapkan di Indonesia yang masih diwarnai besarnya tenaga kerja berpendidikan rendah. Dengan tenaga kerja berkualitas akan mempermudah percepatan pengembangan industri sementara di sektor pertanian dengan sebagian besar tenaga kerja berkualitas rendah akan lebih mempersulit pengembangannya.

Ketiga, kebijakan masa lalu utamanya masa Orde Baru lebih memihak kepada pengusaha menengah keatas (konglomerat).

Pada Pengusaha Besar walaupun mengembangkan industri pertanian tetapi lebih “memihak” kepada industri yang lebih mengutamakan kombinasi antara *broad base industry* dengan *hi-tech industry* untuk kepentingan pengusaha skala besar. Keperpihakan orde baru lebih mengarah pada pengusaha besar atau konglomerat, terbukti dari: kurangnya kepercayaan pemerintah kepada petani atau bahkan kecilnya *support* kepada mereka. Peran pemerintah yang terlampau kuat di masa lalu melahirkan suatu generasi (atau mungkin dua atau tiga generasi) *entrepener* yang berorientasi kepada pemerintah. Pemerintah sebagai pengatur, pemberi konsesi, sekaligus sebagai pembeli besar, lewat hubunganhubungan kekeluargaan dan lain-lain, telah melahirkan generasi pengusaha pemburu rente dan pengusaha yang tumbuh dari atas. Pengusaha ini tumbuh karena hubungannya dengan aparatur negara, dibantu dengan utang dari bank-bank pemerintah dengan berbagai fasilitas dan proteksi, bahkan dihubungkan dengan mitra asing. Pengusaha jenis ini jelas tidak tahan banting, tidak memiliki insentif untuk memupuk intangible (ketrampilan, reputasi, nama merk, budaya kepegawaian dan pengetahuan), tidak tertarik melakukan inovasi dan akan berorientasi kepada komoditi dan kekayaan alam yang mudah diambil dan dijual. Dampaknya, tidak ada upaya eksplorasi kepada mata rantai usaha yang memberikan nilai tambah terbesar dan akan menjadi jago kandang yang selalu minta fasilitas.

Kebijakan masa lalu walaupun mengembangkan industri pertanian tetapi lebih “memihak” kepada industri yang lebih mengutamakan kombinasi antara *broad base industry* dengan *hi-tech industry* untuk kepentingan pengusaha skala besar. Keperpihakan orde baru lebih mengarah pada pengusaha besar atau konglomerat, terbukti sebagian besar kredit macet berada pada pinaknya. Sementara kredit di pertanian hanya sebagian kecil saja.

Peran pemerintah yang terlampau kuat di masa lalu melahirkan suatu generasi (atau mungkin dua atau tiga generasi) *entrepener* yang berorientasi kepada pemerintah. Pemerintah sebagai pengatur, pemberi konsesi, sekaligus sebagai pembeli besar, lewat hubunganhubungan kekeluargaan dan lain-lain, telah melahirkan generasi pengusaha pemburu rente dan pengusaha yang tumbuh dari atas. Pengusaha ini

tumbuh karena hubungannya dengan aparaturnegara, dibantu dengan utang dari bank-bank pemerintah dengan berbagai fasilitas dan proteksi, bahkan dihubungkan dengan mitra asing. Pengusaha jenis ini jelas tidak tahan banting, tidak memiliki insentif untuk memupuk intangible (ketrampilan, reputasi, nama merk, budaya kepegawaian dan pengetahuan), tidak tertarik melakukan inovasi dan akan berorientasi kepada komoditi dan kekayaan alam yang mudah diambil dan dijual. Dampaknya, tidak ada upaya eksplorasi kepada mata rantai usaha yang memberikan nilai tambah terbesar dan akan menjadi jago kandang yang selalu minta fasilitas (Kasali, 2000).

Keempat, munculnya paradoks Pertanian Modern yang efisien dan kompetitif, membawa konsekuensi bahwa usaha di sektor pertanian harus efisien dan mampu bersaing. Sementara kenyataan yang ada lahan di pertanian semakin sempit pemilikannya dan kualifikasi tenaga kerja yang ada masih rendah, sehingga seringkali membawa pertanian kedalam kondisi in-efisien dan kurang mampu bersaing.

Munculnya paradoks antara kenyataan yang ada yaitu semakin sempitnya pemilikan lahan mendorong penggunaan teknologi budidaya yang padat karya (*labor intensive*), sementara kebijakan pertanian modern yang efisien dan kompetitif mensyaratkan penggunaan mesin (*capital intensive*). Kenyataan menunjukkan bahwa walaupun peran sektor pertanian dalam perolehan PDB menurun tetapi penyerapan tenaga kerja masih saja lebih tinggi dari pada sektor industri. Hal tersebut memberikan gambaran bahwa keunggulan industri dalam peningkatan pertumbuhan tidak disertai keunggulannya dalam penyerapan tenaga kerja. Perlu menjadi pertimbangan bagi Indonesia, dengan mendasarkan kondisi besarnya jumlah penduduk, apakah harus menerapkan perkembangan industri yang hemat tenaga kerja.

Kontribusi sektor pertanian terhadap PDB dari tahun 1961-1999 (data 5 tahunan) menunjukkan penurunan sebesar 0,27% per tahun sementara sektor industri menunjukkan kenaikan sekitar 3,60% per tahun. Transformasi ini wajar saja terjadi di negara sedang berkembang, namun yang perlu diwaspadai adalah ketidakmampuan

sektor industri mentranfer tenaga kerja dari sektor pertanian. Akibatnya pendapatan per kapita tenaga kerja di industri lebih besar dari pada sektor pertanian.

Pemecahan masalah ekonomi di Indonesia (khususnya pembangunan pertanian) saat ini sangat luas, oleh karenanya diperlukan strategi pembangunan yang memiliki jangkauan pemecahan masalah tidak hanya mewujudkan pertumbuhan ekonomi, tetapi secara simultan mampu menghasilkan devisa yang besar untuk pembayaran hutang, menciptakan lapangan pekerjaan terhadap keragaman tenaga kerja, memperkuat sistem ketahanan pangan, mewujudkan pemerataan dan menjamin pembangunan berkelanjutan. Salah satu jawabannya (kalau bukan satu-satunya) adalah pembangunan pertanian dengan pendekatan pembangunan sistem agribisnis.

Fenomena lain adalah adanya tekanan penduduk di wilayah padat yang subur, sehingga pemilikan lahan menjadi kecil-kecil yang mendorong penggunaan teknologi budidaya yang padat karya (*labor intensive*) sementara visi pertanian modern yang efisien dan kompetitif mengharuskan penggunaan alat mesin pertanian sebagai prasyarat. Oleh karenanya banyak petani miskin yang menghadapi ketiadaan atau kekurangan akses atau *property right* terhadap sumber daya lahan, sehingga petani kecil atau buruh tani sulit memperoleh modal karena lahan yang digarapnya tidak dapat dijadikan kolateral. Demikian pula intensifnya berbagai kebijakan perdagangan dan tata niaga yang distorsif, yang pada hakikatnya merugikan petani, bahkan tidak jarang melumpuhkan kesinambungan usaha tani di berbagai daerah karena mereka tetap kurang berdaya untuk mampu maju dan berkembang seperti yang diangan-angankan.

III. Keterpurukan Pembangunan Pertanian

Sejak dulu dikatakan bahwa Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Sampai sekarang pun sekitar 70% penduduk menggantungkan hidup dari sektor pertanian atau mempunyai mata pencaharian sebagai petani. Sayangnya, nasib petani dari hari ke hari kian terpuruk. Tingkat kesejahteraannya tidak membaik seiring dengan laju pertumbuhan ekonomi yang semestinya dinikmati bersama. Posisi tawar mereka lemah sekali sehingga masalah yang dihadapi ibarat sebuah lingkaran setan yang tak

berujung pangkal. Kebijakan pemerintah sudah banyak dilakukan namun belum mengena sasaran, belum *powerful*, dan belum intensif. Akibatnya, nilai tukar produk pertanian termasuk pangan tetap rendah. Peningkatan pendapatan di sektor pertanian pun termasuk paling lambat.

Kita bertekad mengunggulkan sektor pertanian. Namun kenyatannya tidak menunjukkan ke arah itu. Selama lebih dari tiga dasawarsa pada masa Orde Baru, pembangunan industri lebih diperhatikan. Itu pun industri manufaktur substitusi impor yang tidak terkait dengan sektor pertanian. Jadilah pembangunan pertanian hanya ada dalam kata-kata manis atau normatif di Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Sekarang sudah banyak sarjana pertanian di negeri ini, tetapi mereka banyak yang menganggur atau bekerja di luar bidangnya. Sebuah ironi besar yang sulit terbantahkan karena fakta dan angkanya ada. Saat Indonesia mengimpor 2 juta ton beras per tahun, mengimpor gula 1,6 juta ton per tahun, dan gandum 4,5 juta ton per tahun. Belum lagi impor jagung 1,2 juta per tahun dan sapi 450.000 ekor per tahun.

Pertanian memang menempati posisi khusus, selain untuk memperoleh pendapatan juga peran pentingnya *food security* yang berarti pula sebagai keamanan negara. Saat ini (memasuki era global) negara-negara miskin menggantungkan kebutuhan makanannya pada negara maju. Saat ini Indonesia menjadi importir neto beras (terbesar dunia), gula (terbesar kedua), jagung, kedelai, daging sapi, jeruk, bawang merah, berada pada posisi importir neto. Sebaliknya negara maju seperti AS telah memasok sekitar 50% jagung dunia. Gandum dunia didominasi oleh Amerika Serikat, Kanada dan Australia, sementara Kedelai didominasi Amerika bersama Brasil dan Argentina.

Petani Indonesia semakin miskin dan terpuruk. Hal itu terlihat dari presentase rumah tangga petani gurem terhadap rumah tangga pertanian pengguna lahan meningkat menjadi 56,5 persen, padahal dalam Sensus Pertanian 1993 masih sebesar 52,7 persen. Petani gurem yang tadi berjumlah 10.804.000 rumah tangga pada 1993 menjadi 13.663.000 tahun 2003. Terjadi penambahan 3,8 persen petani atau

2.859.000 juta rumah tangga yang menguasai lahan kurang dari 0,5 ha. Selama 10 tahun terakhir, jumlah rumah tangga petani gurem meningkat 2,6 persen/ tahun.

Ada yang menganggap bahwa pemerintah dinilai tidak serius untuk membantu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. Meski harga dasar gabah kering giling telah dinaikkan dari Rp 1.500 menjadi Rp 1.725 per kilogram, hal ini tidak disertai komitmen untuk mengawasi pelaksanaannya di lapangan sehingga harga gabah kering giling di tingkat petani jauh lebih murah, yakni hanya Rp 900-Rp 1.200 (Kompas, 8/1).

Menyoal kesejahteraan petani, secara rata-rata memang masih jauh dari ukuran sejahtera. Bukti yang simple saja, secara situasional petani masih terombang-ambing oleh skenario yang disebut tata-niaga, yang tidak lain adalah "permainan". Pada setiap musim panen, misalnya, pada musim itu pula petani menjerit akibat jatuhnya harga hasil panennya. Ini menunjukkan labilnya pola manajemen pembangunan pertanian tanaman pangan. Tahun 1999 total produksi padi GKG (gabah kering giling) mencapai 50 juta ton yang dihasilkan oleh sekitar 40 juta petani. Dari angka tersebut, dapat dihitung bahwa masing-masing petani menghasilkan 1,25 ton padi/tahun. Tahun 1999 saja (Khudori, Kompas, 2003), total produksi padi GKG (gabah kering giling) mencapai 50 juta ton yang dihasilkan oleh sekitar 40 juta petani. Dari angka tersebut, dapat dihitung bahwa masing-masing petani menghasilkan 1,25 ton padi/tahun. Jika dikalikan harga gabah saat itu Rp 1.000/kg berarti per petani Rp 1,25 juta/tahun, atau per bulan Rp 100.000. Setelah dipotong modal dan biaya-biaya yang mencapai 75%, per petani cuma untung bersih Rp 312.500/tahun atau Rp 25.000/bulan, atau Rp 866,7/hari. Angka itu sungguh memprihatinkan, jauh dari skala layak.

Jika diasumsikan kenaikan produksi padi nasional juga 20%, berarti produksi GKG mencapai 60 juta ton. Dengan asumsi jumlah petani turun 10% sehingga tinggal 36 juta orang petani, maka penghasilan yang akan diperoleh per petani mencapai 1,67 ton/tahun. Apabila diperoleh harga GKG Rp 1.725/kg, diperkirakan seorang petani mendapatkan Rp 2,88 juta/tahun. Hasil ini masih dikurangi 75% biaya produksi, dan keuntungan yang tersisa menjadi Rp 720 ribu/tahun, atau Rp 60.200/bulan atau Rp

2.000/hari. Tentu ini sebuah hitungan yang di "mark-up" . Tapi, ini pun hasil akhirnya masih jauh dibawah UMR (standar Upah Minimum regional). Sebuah potret yang mengeskakan dari sektor pertanian, yang menjadi pilar negeri ini.

Penyebab Keterpurukan Pertanian

1. Kebijakan pertanian yang belum konsisten antarinstansi.

Kebijakan Departemen Pertanian untuk menetapkan harga dasar gabah (HDG) adalah untuk menyejahterakan petani. Namun di tempat lain, Departemen Perindustrian dan Perdagangan membuka keran impor beras sehingga petani tak bisa menikmati harga dasar yang telah ditetapkan pemerintah. Sementara Bulog malah gagal berperan sebagai penyangga harga gabah. Bulog dianggap hanya mengejar keuntungan.

2. Kelangkaan pupuk yang mengakibatkan menurunnya produktivitas dan efisiensi

Dengan surplus produksi yang amat besar (produksi berkisar 6 juta ton, kebutuhan 4.5 juta ton), dan pengaturan sistem distribusi, fenomena langka pasok pupuk di pasaran domestik hanya dapat terjadi karena pabrikan pupuk, secara resmi atau tidak, melakukan ekspor besar-besaran. Perubahan pola pertanaman atau kebutuhan pupuk juga tidak dapat dijadikan alasan karena walaupun terjadi pasti tidak akan amat ekstrim dan mestinya dapat diantisipasi secara dini karena terus diamati oleh pemerintah dan mestinya juga oleh pabrik pupuk.

Ekspor pupuk didorong oleh disparitas harga dunia dan HET yang cukup besar yang tercipta karena harga pupuk di pasar dunia meningkat tajam sejak tahun 2003. Pemicunya adalah peningkatan harga minyak dan gas bumi serta depresiasi rupiah yang merupakan penentu ongkos produksi dan distribusi pupuk.

Harga pupuk urea di pasar dunia meningkat dari 136 dollar AS per ton atau Rp. 1125 per kg pada bulan Mei 2003 menjadi 162 dollar AS per ton atau Rp. 1400 per kg pada bulan April 2004, sementara HET pupuk urea Rp1.050/kg, SP 3 Rp 1.400/kg, ZA Rp 950/kg dan NPK Rp 1.600/kg. Disparitas harga sebesar Rp. 350,- per kg atau 33% (untuk pupuk urea) sangat merangsang bagi pabrikan mendahulukan ekspor daripada pupuk bersubsidi. Harga pupuk di

kawasan perkebunan mencapai Rp.2000,- per kg, di tingkat petani berkisar pada Rp. 1750 sedangkan pupuk bersubsidi tidak diketemukan di kios-kios yang seharusnya menjual pupuk jenis tersebut.

3. Kurang membaiknya prospek pertanian ke depan.

Secara keseluruhan tidak semakin baik, walau ada beberapa komoditi yang mengalami pertumbuhan positif, seperti cokelat, kelapa sawit. Pertumbuh ditopang oleh membaiknya harga jual internasional dan semakin tingginya permintaan dunia maupun domestik. Kelapa sawit, misalnya permintaan domestik terhadap komoditas minyak sawit terus meningkat dari tahun ke tahun. Diperkirakan tahun 2010 kebutuhan minyak sawit mencapai lebih dari 3 juta ton/tahun.

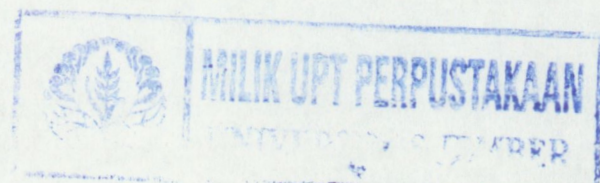
Komoditi yang tidak menunjukkan peningkatan, diantaranya beras dan gula. Persoalan yang melilit komoditi ini sangat beragam, mulai dari penyelundupan, perdebatan mengenai impor beras dan gula, anjloknya harga hingga masalah bea masuk. Dengan liberalisasi perdagangan, importir swasta bebas memasukkan beras dan gula sesuai dengan mekanisme pasar bebas. Padahal harga beras impor cenderung merosot karena praktik *dumping* di negara pengekspor beras, misalnya Amerika Serikat, Thailand, dan Vietnam. Politik *dumping* diterapkan negara-negara yang kelebihan produksi. Untuk menjaga agar harga produk di dalam negeri tetap tinggi, mereka melempar produksi ke pasar luar negeri dengan harga yang lebih rendah.

Para petani sebagai produsen beras domestik tidak mampu menahan anjloknya harga ketika panen raya. Kendati harga gabah telah dijaga dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2002, harga gabah meluncur di bawah patokan harga pembelian pemerintah. Berdasarkan Inpres tersebut gabah kering giling (GKG) Rp 1.725/kg dan gabah kering panen (GKP) Rp 1.230/kg dan harga dasar beras petani sebesar Rp. 2.790,-, tetapi faktanya ketika panen harga pun merosot tajam hingga harga gabah petani di bawah Rp1000/kg. Berbagai hal yang mengakibatkan kebutuhan impor begitu besar, pertama karena kebutuhan di dalam negeri yang sangat besar. Jumlah penduduk amat padat dan laju

pertambahan penduduk ternyata masih relatif tinggi, yakni 1,6% per tahun di samping peningkatan konsumsi per kapita. Kedua, laju pertumbuhan produksi yang rendah semakin tidak bisa mengimbangi. Di samping faktor-faktor tersebut, ada stimulan lain yakni kemudahan mengimpor produk-produk pangan karena negara yang mengekspor menyediakan kredit dan dengan sistem pembayaran yang meringankan.

Penghapusan bea masuk gula impor adalah konsekuensi logis dari kesepakatan pemerintah Indonesia dengan *International Monetary Fund* (IMF), yang tertuang dalam *Letter of Intent* (LoI) tahun 1998. Salah satu poin LoI berisi kesepakatan penghapusan monopoli beberapa komoditas penting, serta pembebasan impor gula bagi importir umum dengan tarif bea masuk 0 persen. Hak mengimpor gula semula dikuasai Bulog. Untuk impor gula di Indonesia, oleh pemerintah diterapkan tarif impor *raw sugar* sebesar 20 persen, dan 25 persen untuk *white sugar*. Padahal, negara-negara pelopor pasar bebas, seperti Amerika Serikat dan Eropa, justru melindungi produk lokal mereka dengan memasang tarif impor yang tinggi. Mereka juga memberikan subsidi kredit ekspor untuk produk pertanian dan pangan. Di Amerika Serikat tarif impor gula mencapai 150 persen, Uni Eropa sebesar 240 persen, sedangkan di Thailand dan Filipina mencapai seratus persen. Tarif impor yang tinggi juga diberlakukan negara-negara itu supaya harga gula impor lebih mahal ketimbang harga gula produksi dalam negeri, yang artinya ada insentif bagi petani. Di sisi lain mereka menuntut penghapusan tarif impor, untuk membuka perdagangan bebas seluas-luasnya.

Jika bea masuk impor gula dihapuskan, konsumen akan diuntungkan. Harga gula di pasaran otomatis lebih murah. Namun, di sisi lain, kebijakan itu mematikan para petani tebu yang seharusnya dilindungi. Produksi gula para petani lokal tidak mungkin bisa bersaing dengan gula impor yang murah, karena mendapat subsidi (*dumping*) oleh pemerintah negara eksportir. Para petani tebu mengeluh gula lokal tidak laku di pasaran karena harga gula impor jauh lebih murah.



Kebijakan pemerintah menolak menaikkan tariff impor gula, sebab dirasa saat ini tariff impor sudah tinggi, dimana harga gula domestik akan meningkat apabila tariff impor gula dinaikkan. Kebijakan tata niaga impor gula, yaitu SK Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 643 Tahun 2002, dibuat untuk mengatur impor dengan mempertimbangkan kepentingan harga di petani. Berdasarkan SK tersebut, hanya PTPN IX, X, XI dan Rajawali Nusantara Indonesia yang tercatat sebagai importir. Sementara importir lokal tidak bisa mengimpor gula putih lagi. Strategi ini pun dianggap tidak efektif sebab cuma memperkaya para pencari rente, para spekulan seenaknya melakukan distorsi pasar.

4. Pengaruh faktor eksternal globalisasi

Pasar bebas yang dipercayai akan meningkatkan kesejahteraan rakyat dan keadilan global, terbukti justru merusak pasar produk domestik. Keterlibatan Indonesia dalam forum internasional, *World Trade Organization* (WTO) yang dimotori negara-negara maju sulit dihindari. Indonesia yang mempunyai pasar ekspor 70 persen ke Amerika Serikat dan negara-negara Eropa harus mematuhi komitmen dalam forum tersebut. Cuma ada satu kebijakan, yaitu liberalisasi. Pemasaran produk pertanian sepenuhnya diatur pasar bebas.

IV. Solusi Untuk Menghindar dari Keterpurukan Pertanian

Agribisnis adalah bisnis berbasis pertanian. Pelaku agribisnis, selain usahanya berbasis pertanian, motivasinya untuk mencari keuntungan melalui kegiatan transaksi. Bisnis berbasis pertanian ini dilakukan oleh banyak petani, nelayan, peternak, pekebun, para pedagang, para pengolah, pedagang sarana produksi, jasa pengemasan, transportasi dan jasa-jasa terkait agribisnis lainnya. Usahanya dapat pribadi seperti usaha rumah tangga para petani-nelayan, atau bentuk badan usaha, baik perorangan, koperasi, swasta (CV, PT) atau BUMN.

Para petani subsisten merupakan kelompok yang dominan dalam masyarakat agribisnis, yang umumnya dicirikan dengan kecilnya dalam kepemilikan dan penguasaan faktor produksi, terbatasnya akses terhadap sumber-sumber permodalan (lembaga perbankan), informasi dan teknologi, serta terbatas dalam kemampuan

manajerial. Keterbatasan ini dapat mempengaruhi motivasi, perilaku dan kesempatan pengembangan usahanya. Selain itu, vokalitas untuk memperjuangkan pendapat dan kebutuhan dari kelompok ini biasanya relatif rendah. Agar kelompok ini dapat berkembang bersama-sama pelaku ekonomi lainnya maka perlu adanya kebijaksanaan yang memberikan peluang yang lebih besar agar para petani-nelayan, termasuk para pengusaha kecil dan menengah dapat mengembangkan usahanya.

Kendala di atas, umumnya masih dihadapi pula oleh kelompok petani subsisten (pengusaha kecil dan menengah), seperti:

- a. Tingkat kemampuan dan profesionalisme sumberdaya manusia yang : umumnya masih rendah
- b. Kekurangmampuan dalam memanfaatkan dan memperluas peluang dan akses pasar
- c. Kelemahan dalam struktur permodalan dan keterbatasan akses terhadap sumber-sumber permodalan
- d. Keterbatasan dalam penguasaan teknologi
- e. Kelemahan di bidang organisasi dan manajemen

Disamping kendala di atas, petani subsisten menghadapi kendala eksternal diantaranya adalah:

- a. Iklim usaha yang kurang kondusif karena masih ada persaingan yang kurang sehat
- b. Sarana dan prasarana yang kurang memadai
- c. Kurangnya pemahaman, kepercayaan dan kepedulian masyarakat, terutama terhadap koperasi

Pengembangan Petani sebagai Sumberdaya Manusia Agribisnis

Pengembangan sumberdaya manusia (petani) merupakan hal penting yang perlu diperhatikan dalam pembangunan sistem dan usaha agribisnis. Hal ini disebabkan karena dalam pembangunan sistem dan usaha agribisnis, petani tidak hanya sekedar faktor produksi melainkan yang lebih penting lagi adalah pelaku langsung dari pembangunan sistem dan usaha agribisnis.

Untuk membangun sistem agribisnis, paling sedikit terdapat tiga sasaran penting pengembangan petani agribisnis di Indonesia. **Pertama** adalah mengembangkan kemampuan penguasaan teknologi dan pengetahuan sehingga searah dengan pengembangan teknologi pada sistem dan usaha agribisnis; **Kedua**, mengembangkan kemampuan kewirausahaan (*entrepreneurship*) sehingga dapat menjadi pelaku-pelaku ekonomi yang handal/tangguh dan **Ketiga**, mengembangkan kemampuan *team work*. Sumberdaya manusia agribisnis dalam hal ini mencakup petani agribisnis pelaku langsung seperti tenaga kerja yang bekerja pada sub-sektor agribisnis hulu, sub-sektor *on-farm agribusiness* dan sub-sektor agribisnis hilir, dan petani agribisnis pendukung sektor agribisnis seperti birokrat pusat hingga ke daerah, petani perbankan dan petani penyedia jasa bagi agribisnis.

Karakteristik khusus yang dimiliki sektor agribisnis seperti ketergantungan (*interdependency*) yang kuat antar sub-sektor, antar unit-unit kegiatan dalam satu sub-sektor atau usaha; karakteristik produk yang merupakan produk biologis, menuntut *teamwork* petani agribisnis yang harmonis. Berbagai bentuk masalah ketidakefisienan dan kelambanan perkembangan sektor agribisnis di masa lalu (juga pengalaman agribisnis Amerika Serikat, Australia dan Kanada), banyak bersumber dari ketidakharmonisan petani atau tidak berjalannya suatu *teamwork* yang harmonis. Pelaku ekonomi pada sub-sektor agribisnis hulu yang cenderung bertindak demi kepentingan sendiri dan tidak melihat konsekuensi perilakunya pada sub-sektor *on-farm agribusiness* dan sub-sektor agribisnis hilir, sering menimbulkan konflik ekonomi dalam sektor agribisnis itu sendiri. Demikian juga pelaku ekonomi pada sub-sistem agribisnis hilir, yang bertindak demi kepentingan sendiri dan tidak melihat konsekuensi tindakannya pada sub-sistem *on-farm agribusiness* juga sering menciptakan konflik ekonomi dalam sektor agribisnis secara keseluruhan. Kondisi ini semakin diperburuk pula oleh kebijaksanaan atau layanan yang disediakan oleh lembaga penyedia jasa sektor agribisnis (pemerintah, perbankan dan lain-lain) yang tidak integratif dilihat dari tuntutan agribisnis sebagai suatu sistem, sehingga sering menciptakan optimisme pada sub-sektor tertentu dan pesimisme pada sub-sektor yang lain. Secara keseluruhan, hal-hal tersebut telah merugikan perkembangan

sektor agribisnis dan tentunya juga merugikan semua pelaku agribisnis secara keseluruhan.

Dengan latar belakang pendidikan formal dan pengalaman sumberdaya agribisnis yang bervariasi, memang tidak mudah untuk membangun suatu *teamwork* yang harmonis. Untuk pengembangan sektor agribisnis perlu membangun suatu *teamwork* yang harmonis, setiap petani agribisnis harus memiliki wawasan *cross-job*, wawasan yang luas tentang posisinya dalam perusahaan/departemen, wawasan yang luas tentang perusahaan dalam industri (*micro-behaviour*), wawasan *psychology* dan dinamika pasar, wawasan tentang posisi sektor agribisnis dalam perekonomian (*macro behaviour*) bahkan wawasan yang luas tentang ekonomi global (*global behaviour*). Untuk memampukan petani agribisnis yang demikian, diperlukan suatu *on-the job cross training*, selain *on-the job training* yang telah berlangsung selama ini. Esensi dari *cross training* ini adalah untuk membina petani agribisnis agar memiliki wawasan *how to do each other's job* melalui simulasi *on-the job cross-training exercise*. Untuk itu perlu dirancang kebijaksanaan yang merangsang tumbuhnya lembaga-lembaga penyedia jasa *training* di bidang agribisnis terutama di daerah.

Dalam upaya pengembangan pembinaan petani agribisnis nasional, kita perlu lebih menajamkan program pembinaan SDM agribisnis dengan mendayagunakan Diklat-Diklat Departemen Teknis, lembaga pengembangan SDM perguruan tinggi dan perusahaan swasta, secara terencana dan terarah. Dalam hal ini, Departemen Tenaga Kerja dapat menjadi koordinator, perencana dan pengevaluasi program pembinaan petani agribisnis berskala nasional atau global, yang kemudian diterjemahkan pada program-program yang lebih spesifik pada Diklat-Diklat Departemen Teknis dan selanjutnya pada pengembangan PETANI pada *level* perusahaan atau pada *level* Balai Penyuluh Pertanian (agribisnis). Dengan perkataan lain, kita memerlukan sistem pembinaan dan pengembangan petani agribisnis nasional yang mampu meningkatkan wawasan *micro-macro-global behavior* dari petani agribisnis sedemikian rupa sehingga *teamwork* yang harmonis dapat operasional.

Kualitas dan kemampuan aparat yang mampu meningkatkan kreativitas sumberdaya manusia pelaku agribisnis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pembangunan sistem dan usaha agribisnis. Perkembangan tahapan kemajuan sistem agribisnis sangat tergantung pada tingkat keahlian yang dimiliki oleh pelaku agribisnis. Oleh karena itu perlu dibuat berbagai kebijaksanaan yang dapat mengefektifkan fungsi penyuluhan dengan sasaran khusus pengembangan sistem dan usaha agribisnis. Sasaran penyuluhan perlu diperluas tidak hanya pada petani, tetapi juga pelaku agribisnis lainnya. Demikian pula lingkup penyuluhan harus mencakup agribisnis hulu, on-farm dan agribisnis hilir (termasuk pemasaran). Disamping itu penyuluhan dalam rangka pengembangan kelembagaan ekonomi petani juga perlu dilakukan. Khusus untuk penyuluhan dengan sasaran petani sebagai salah satu pelaku agribisnis, pendekatan penyuluhan partisipatif perlu dijadikan kebijaksanaan pengembangan penyuluhan.

Hal lain yang perlu dilakukan untuk mengembangkan agribisnis antara lain :

1. Mengembangkan agribisnis atas dasar keunikan (uniqueness) alam tropika yang produknya selain bernilai tinggi juga tidak dapat disubstitusi oleh hasil di negara non-tropis,
2. Meningkatkan nilai tambah atas dasar mengolah produk utama lokal untuk memenuhi kebutuhan pokok yang sulit untuk diimpor.

Beberapa faktor utama menjadi perhatian bersama, yakni produktivitas, efisiensi, kualitas serta nilai tambah. Artinya, agribisnis tidak boleh berhenti pada upaya produksi komoditas primer, tetapi justru harus jauh ke hilir. Amerika Serikat, Kanada, Eropa Barat, Australia dan Selandia Baru adalah contoh negara-negara yang sukses dalam membangun agribisnis dan agroindustri yang kuat dan tangguh. Komitmen negara-negara itu untuk membangun sektor ini tidak tanggung-tanggung, seperti contohnya Amerika Serikat dan Kanada berani memberikan subsidi hingga US\$360 miliar untuk memproteksi sektor pertaniannya. Mereka membangunnya dari hulu ke hilir, dengan basis sumberdaya alam.

3. Mengembangkan loyalitas konsumen akan produk dalam negeri dan mencegah terbentuknya budaya ketergantungan akan produk impor.

4. Pempangkas wewenang pusat merupakan tuntutan otonomi.

Pelaksanaan otonomi daerah akan menggeser paradigma pengelolaan sumber daya alam yang dulu hanya bertumpu di Pusat, kini akan dikelola secara mandiri oleh daerah. Desentralisasi pengelolaan sumber daya alam, khususnya agribisnis, diharapkan dapat mendorong kepala daerah dan jajarannya untuk memperbaiki kesejahteraan petaninya. Otonomi daerah mengandung makna bahwa daerah mempunyai keleluasaan merancang program pembangunan di daerahnya (termasuk pembangunan agribisnis) dengan dana alokasi umum (DAU) sebagai dana block grants dari pusat. Daerah dapat menerapkan kebijakan-kebijakan mikro yang langsung berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan petani. Penetapan HDG adalah kebijakan makro di tingkat nasional, daerah harus merumuskan kebijakan mikronya. Untuk mengamankan kebijakan harga dasar pemda harus menyediakan dana APBD untuk melindungi harga dasar itu. Jangan sampai harga di tingkat petani dipermainkan tengkulak. Apabila harga jatuh, pemerintah daerah berkewajiban membeli produk pertanian dengan harga sesuai harga dasar. Peran ini dulunya harus dijalankan Bulog/Dolog. Namun, kini lebih tepat dipegang langsung oleh pemda karena pemda dapat menyediakan dana melalui APBD. Bahkan dana APBD untuk proteksi harga komoditas pertanian ini hendaknya tidak hanya terbatas pada beras, juga komoditas strategis lainnya yang menjadi andalan daerah, seperti cabe, tembakau, dan kakao. Melindungi harga dasar komoditas pertanian di tingkat petani merupakan langkah sederhana, tetapi langsung dirasakan.

5. Perlu ada keberpihakan pemerintah terhadap sektor agribisnis.

Agribisnis belum dianggap sebagai penggerak roda perekonomian. Padahal Indonesia memiliki sumber daya manusia, lahan, namun tidak mampu menumbuhkan agribisnis di dalam negeri. Perlu keberpihakan pemerintah terhadap petani produsen. Proteksi terhadap sektor agribisnis domestik, menjadi sesuatu yang harus dikedepankan. Agribisnis di Indonesia sesungguhnya adalah

salah satu sektor utama yang menjaga hidup ekonomi bangsa. Indonesia memerlukan perencanaan serta penerapan konsep agribisnis dan agroindustri yang holistik dan terpadu, perbaikan lingkungan agribisnis, peningkatan peran kelembagaan dan pengembangan model pembangunan wilayah. Keperpihakan ini haruslah bersifat holistik, yaitu mencakup kegiatan hulu dan hilirnya. Perhatian pada sub sistem produksi haruslah mencakup keperpihakan pada sektor hulu, yaitu sub sistem sarana produksi seperti pengadaan pupuk, serta sektor hilir berupa sub sistem pemasaran dan pengolahan hasil. Jika hal itu terwujud, maka kejayaan agribisnis niscaya akan berkesinambungan.

6. Pembenahan tataniaga menghadapi liberalisasi perdagangan

Dulu, pemerintah melalui Bulog berperan sebagai *buffer stock* sekaligus yang mengatur impor. Jadi kalau harga gabah jatuh, Bulog bisa disalahkan karena tekanan banyaknya beras yang didatangkan. Tapi sekarang? Sejak bulan April tahun 1998 hasil kesepakatan dengan IMF diputuskan pelepasan monopoli Bulog dimana ekspor dan impor gula dibebaskan sama sekali mengikuti mekanisme pasar, termasuk pembebasan bea masuk., sedangkan Bulog hanya mengurus impor beras. Kebijakan ini dilanjutkan dengan reposisi Bulog sebagai perusahaan umum (perum) yang berperan sebagai pelaksana kebijakan stabilisasi harga beras namun lebih bersifat sebagai lembaga *profit* akan sangat menentukan nasib kebijakan perberasan nasional. Pada dasarnya keterlibatan Bulog masih diakui dalam perjanjian perdagangan pertanian dunia dalam GATT/WTO sebagai *State Trading Enterprise (STE)*, seperti halnya yang terjadi di Malaysia dengan Bernas, Philipina dengan NFA (National Food Authority).

Tampaknya masih ada kesadaran yang kuat bahwa pangan terlalu beresiko apabila diserahkan kepada mekanisme pasar. Bagi Indonesia apabila menerapkan kebijakan penghapusan tariff untuk beras dan gula sampai nol persen adalah menyulitkan, dimana Indonesia menjadi target pasar bagi negara-negara maju. Pada dasarnya ekspor dunia berasal dari negara eksportir merupakan *residual trader* yang harus dikeluarkan agar tidak mengganggu stabilitas harga domestik.

Sampai saat ini masih terdapat campur tangan pemerintah di negara maju utamanya dalam penetapan tarif, seperti ditetapkannya *initial tariff rate* sangat tinggi. Sebagai contoh, tarif awal di USA untuk gula sebesar 244%, Jepang untuk beras 351 yen/kg, Uni Eropa untuk gandum 168%, dan negara-negara tersebut hanya menurunkan maksimum 36% dari tingkat tersebut selama kurun waktu 6 tahun sampai tahun 2000. Contoh lainnya, di tahun 2002, harga domestik per kilogram gula di Thailand setara dengan Rp. 4000,- bea masuk 90%, di India setara Rp. 4200 dengan bea masuk 120% dan di Australia setara Rp. 5000,-. Harga ini lebih mahal dari rata-rata harga gula di pasar internasional yang rata-rata di tahun 2002 berkisar antara 210 dollar AS per ton (Kompas, 2003). Oleh karenanya bagi Indonesia sebenarnya masih dapat melakukan tarif 110 persen yang masih dalam batas toleransi WTO untuk diterapkan hingga 2010. Atau menggunakan alternatif kebijakan di era liberalisasi perdagangan adalah tetap memberlakukan bea masuk seperti beras sebesar Rp. 650/kg dan gula Rp. 770/kg. Beberapa aturan lain seperti AFTA, Indonesia mengusulkan *ending rate* bea masuk 20% tahun 2010 dan persetujuan IMF bea masuk beras menjadi 30%.

Hasil penelitian Hariyati (2003) tentang perdagangan beras dan gula di era liberalisasi perdagangan menunjukkan bahwa peramalan, dengan tetap mempertahankan intervensi pemerintah berupa penetapan tarif impor sesuai dengan aturan perjanjian perdagangan disertai kebijakan pendukung menunjukkan bahwa dengan Indonesia akan menjadi pengeksport beras pada tahun 2014 dan pengeksport gula pada tahun 2008. Aturan perjanjian perdagangan internasional GATT/WTO untuk produk pertanian adalah penurunan tarif di negara maju tarif turun sampai 36% sedangkan negara berkembang turun 24%. Kebijakan pendukung yang disimulasikan untuk komoditas beras berupa peningkatan harga dasar gabah sebesar 25%, peningkatan produktivitas lahan sebesar 25% dan penurunan harga pupuk sebesar 10% melalui subsidi pemerintah. Untuk komoditas gula disimulasikan kebijakan pendukung berupa peningkatan produktivitas lahan sebesar 25%, peningkatan rendemen sebesar 10% dan penurunan harga pupuk sebesar 10% melalui subsidi pemerintah.

V. Penutup

Masa lalu memberikan gambaran bahwa meskipun lebih dari tiga dekade, tetapi potret pertanian masih tetap belum berubah. Sektor pertanian masih menjadi tumpuan masyarakat sebagai sumber matapencarian utama dan sebagian besar tenaga kerja terkonsentrasi di sektor pertanian. Sementara sumbangannya terhadap PDB menjadi semakin kecil.

Pada kebijakan tingkat makro ekonomi dapat dilihat bahwa, sekurang-kurangnya hingga akhir tahun 1999, **sektor pertanian hampir tidak mendapat perhatian secara proporsional**. Hal ini terbukti dari strategi industrialisasi yang dianut selama ini tidak memihak pada sektor pertanian, terlihat dari :

Pertama, kebijakan industrialisasi lebih mengarah pada industri berbasis impor dan berorientasi pada pasar luar negeri yang kurang bisa dinikmati oleh bangsa Indonesia namun banyak menyerap penanaman modal yang ada. **Kedua**, kebijakan industrialisasi mengutamakan teknologi canggih berbasis impor, berkonsekuensi dibutuhkan tenaga kerja berkualitas. **Ketiga**, kebijakan masa lalu utamanya masa Orde Baru lebih memihak kepada pengusaha menengah keatas (konglomerat) Pada Pengusaha Besar walaupun mengembangkan industri pertanian tetapi lebih “memihak” kepada industri yang lebih mengutamakan kombinasi antara *broad base industry* dengan *hi-tech industry* untuk kepentingan pengusaha skala besar. Keperpindahan orde baru lebih mengarah pada pengusaha besar atau konglomerat. Terbukti dari kurangnya kepercayaan pemerintah kepada petani atau bahkan kecilnya *support* kepada mereka. **Keempat**, munculnya paradoks Pertanian Modern yang efisien dan kompetitif, membawa konsekuensi bahwa usaha di sektor pertanian harus efisien dan mampu bersaing. Sementara kenyataan yang ada lahan di pertanian semakin sempit pemilikannya dan kualifikasi tenaga kerja yang ada masih rendah, sehingga seringkali membawa pertanian kedalam kondisi in-efisien dan kurang mampu bersaing.

Pemecahan masalah ekonomi di Indonesia (khususnya pembangunan Agribisnis) saat ini sangat luas, oleh karenanya diperlukan strategi pembangunan yang memiliki jangkauan pemecahan bermasalah tidak hanya mewujudkan

pertumbuhan ekonomi, tetapi secara simultan mampu menghasilkan devisa yang besar. Salah satu jawabannya (kalau bukan satu-satunya) adalah pembangunan pertanian dengan pendekatan pembangunan sistem agribisnis. Untuk itu diperlukan pengembangan petani sebagai sumberdaya manusia agribisnis yang awalnya berkarakteristik subsisten menjadi berorientasi pada bisnis (agribisnis). Langkah lain guna menghindari keterpurukan agribisnis diantaranya : mengembangkan agribisnis atas dasar keunikan (*uniqueness*) alam tropika, meningkatkan nilai tambah atas dasar mengolah produk utama lokal, mengembangkan loyalitas konsumen akan produk alam negeri, pemangkasan wewenang pusat merupakan tuntutan otonomi, Perlu ada keberpihakan pemerintah terhadap sektor agribisnis dan Pembinaan tataniaga menghadapi liberalisasi perdagangan.

Daftar Pustaka

- Agus Pakpahan, 2004. **Pembangunan Pertanian : Mencari Jalan Keluar dalam Kompleksitas Globalisasi**. Kompas, 19 Mei 2004, Jakarta.
- Bali Post, 2003. **Kebijakan Pembangunan Rugikan Petani**.
<http://www.balipost.co.id/balipostcetak/2003/4/10/b11.htm>
- Bungaran Saragih, 2000. **Membangun Masa Depan Ekonomi Indonesia Melalui Pembangunan Sektor Agribisnis**. Dalam : *Menggugat Masa Lalu, menggagas Masa Depan Ekonomi Indonesia*. Sularto (Editor). Kompas, Jakarta.
- Bungaran Saragih, 2000 b. **Reformasi strategi Pembangunan Indonesia..** Dalam : *Menggugat Masa Lalu, menggagas Masa Depan Ekonomi Indonesia*. Sularto (Editor). Kompas, Jakarta.
- Dedy Muhtadi, 1999. **Pertanian pun Masih Coreng-Moreng**. Dalam : *Menggugat Masa Lalu, menggagas Masa Depan Ekonomi Indonesia*. Sularto (Editor). Kompas, Jakarta.
- Elly Burhaini Faizal dan Heri Soba, 2003. **Dampak WTO : Mengancam Produk Domestik**.
<http://www.suarapembaruan.com/News/2003/09/10/Utama/ut06.htm>
- Kaman Nainggolan, 2000. **Diskriminasi Pertanian**. Kompas, 11 Mei 2000. Jakarta.

Kompas, 2004. **Sektor Pertanian Makin Tertinggal**. Jakarta.

Naomi Siagian, 2004. **Proses Pemiskinan pada Sektor Pertanian : Jumlah Petani Gurem Semakin Membengkak**.

<http://www.sinarharapan.co.id/ekonomi/industri/2004/0107/ind1.html>

Pantjar Simatupang, 2004. **Kembalikan Subsidi Pupuk Kepada Petani**. Kompas, 19 Mei 2004, Jakarta.

Priyono, 2003. **Pahitnya Bertani Di Tanah Agraris**.

http://www.denpasar.go.id/new/main.php?act=i_opi&xid=15

Randahll, A. 1981. **An Economic Approach to Natural Resource and Environmental policy**. Grid Publishing Inc, Colomus, Ohio.

Rudi Wibowo, 1996. **Ekonomi Pertanian Indonesia Menyongsong Era Globalisasi**. Makalah Seminar Nasional diselenggarakan Universitas Jember, 15 Oktober 1996.

Sigit Hananto, 1989. **Transformasi Tenaga Kerja di Indonesia Selama Pelita**. Prisma Vol. 5 Tahun XVIII, LP3ES, Jakarta.

Suara Merdeka, 2003. **Keprihatinan di Sekitar Masalah Pangan**.

<http://www.suaramerdeka.com/harian/0310/28/tjk1.htm>

Syarifudin Musa, 1999. **Mencari Kembali Swasembada Yang Hilang**. Dalam : Refleksi Pertanian, Rudi Wibowo (Penyunting). Sinar Harapan 1999.

Yuli Hariyati, 2003. **Performansi Perdagangan Beras dan Gula Indonesia di Era Liberalisasi Perdagangan**. Disertasi.

PROPOSAL

**SEMINAR NASIONAL
dan
RAKERNAS II IMEPI**



**HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN-IESP
UNIVERSITAS JEMBER**

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS JEMBER

**HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN (HMIJ)
ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN (IESP)
JL. JAWA 17 JEMBER 68121, KOTAK POS 125 JEMBER 68100
TELP. (0331) 337990 - FAX. (0331) 332150**

SEMNAS DAN RAKERNAS II IMEPI

Pembicara : **Dr. Saukani ***

Tema : **“Pengembangan Agribisnis dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Daerah”**

Moderator : **Tatang Ary G., M. Buss ACC, Ph. D***

16.00 – 17.00 : Penutupan Seminar

17.00 – 19.30 : Ishoma

19.30 – 21.30 : Sharing tentang Ekonomi Pembangunan

21.30 – 23.00 : Pembahasan Tata Tertib Rakernas

23.00 - : Istirahat

Selasa, 25 Mei 2004

06.30 – 08.00 : Sarapan

08.00 – 10.00 : Pembahasan Rakernas

10.00 – 10.30 : Coffe Break

10.30 – 12.00 : Pembahasan Rakernas

12.00 – 13.00 : Ishoma

13.00 – 14.30 : Lanjutan Pembahasan Rakernas

14.30 – 16.00 : Pembahasan Sidang-sidang Komisi

16.00 – 16.30 : Ishosnack

16.30 – 17.30 : Sidang Komisi

17.30 – 18.30 : Ishoma

18.30 – 21.30 : Sidang Pleno

21.30 - 22.30 : Penutupan Rakernas

22.30-..... : Istirahat

Rabu, 26 Mei 2004

06.30 – 08.00 : Sarapan

08.00 – 09.00 : Persiapan Field Trip

09.00 -- 16.30 : Field Trip

16.30 – 19.00 : Ishoma dan Persiapan Inagurasi

19.00 -- selesai : Pelaksanaan Malam Keakraban

Kamis, 27 Mei 2004

06.30 – 08.00 : Sarapan dan Persiapan Check Out

08.00 – selesai : Check Out dan Sayonara

** Dalam konfirmasi aktif panitia*

Contact Person : **Yuyun (081553319717)**

Aziz (08121764212)

Afrie (08123352594)

Joko (08157942294)



**SUSUNAN ACARA
SEMINAR NASIONAL DAN RAPAT KERJA NASIONAL II IMEPI**

Minggu, 23 Mei 2004

- 08.00 – 19.00 : Registrasi peserta
- 19.00 – 20.00 : Makan malam
- 20.00 – 21.00 : Perkenalan Panitia & Peserta + Ramah Tamah
- 21.00 – 22.00 : Teknikal Meeting
- 22.00 - : Istirahat

Senin, 24 Mei 2004

- 06.30 – 07.30 : Sarapan dan Persiapan Seminar
- 07.30 – 08.30 : Opening Ceremony

- Sambutan : - Ketua Panitia
- Ketua HMJ IESP FE UNEJ
- Sekjen IMEPI 2004/2005
- Rektor UNEJ

08.30 – 09.00 : Coffe Break

09.00 – 09.30 : **Keynote Speech**

Prof. Dr. Ir. H. Idha Haryanto

Tema : “Keterpurukan Sektor Agribisnis dan Tantangannya dalam Menghadapi Perdagangan Bebas”

09.30 – 12.30 : **Panel Ahli I**

Pembicara : **Dr. Ir. Nuhfil Hanani, AR, MS**

Tema : “Arah dan Strategi Kebijakan Pembangunan dalam Pengembangan Agribisnis di Indonesia”

Pembicara : **Dr. Ir. Yuli Hariyati, MS**

Tema : “Upaya Membangun Pola Keselarasan antara Petani Agribisnis dengan Petani Sub Sistem”

Pembicara : **Dr. Mudji Sutrisno, SY (Budayawan)**

Tema : “Tinjauan Kritis Perubahan Sosial Budaya Masyarakat Indonesia di Sektor Agribisnis”

Moderator : **Dr. Sarwedi, MM.**

12.30 – 13.30 : Ishoma

13.30 – 16.30 : **Panel Ahli II**

Pembicara : **Dr. Ir. Agus Pakpahan (Dosen IPB)**

Tema : “Penataan Kelembagaan Sektor Pertanian Menuju Kemandirian Agribisnis”

Pembicara : **Adi Prasongko (Direktur Produksi PTPN 10)***

Tema : “Sistem Manajemen Agribisnis dalam Menghadapi Perdagangan Bebas”

❖ Divisi Konsumsi

Co. Shofia (01-1359)

Anggota :	Nunik Dyah W	(01-1003)
	Neni Jumarni	(02-1015)
	Suprianik	(02-1193)
	Diah Ida F	(03-1147)

❖ Divisi Pubdekdok

Co. Budiana Mardi S (01-1300)

Anggota :	Tinu Ari P	(02-1168)
	Elok Fitri	(02-1194)
	Alvin Nur M	(03-1090)
	Riza Zamroni	(03-1181)

❖ Divisi Acara

Co. Yullyani Dewi Z (01-1195)

Anggota :	Nely Kurniawati	(01-1032)
	Azis Supriawan	(02-1291)
	Laily C. H	(03-1038)
	Lailatul N	(03-1083)
	Winda Nurliana	(03-1089)

❖ Divisi Humas

Co. Topo Haryanto (01-1070)

Anggota :	Anton Purwanto	(01-1274)
	Hendri Prasojo	(03-1221)
	Fitri Yulia	(02-1169)
	Andra Dian P	(02-1222)
	Selvia Kusuma	(02-1357)
	Nena Handriyana	(03-1171)
	Achmad Rosid	(03-1376)

❖ Divisi Kesehatan

Co. Ibrazatus S (01-1080)

Anggota :	Retno Bekti	(02-1063)
	Dyah Istiyani	(02-1231)

SUSUNAN PANITIA

SEMINAR NASIONAL DAN RAPAT KERJA NASIONAL II
IKATAN MAHASISWA EKONOMI PEMBANGUNAN INDONESIA (IMEPI)
HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN
ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN (HMJ IESP)
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS JEMBER

- Pelindung : Dr. Ir. Tarcisius Soetikto, M.Sc.
(Rektor Universitas Jember)
- Penasehat : Purnomo,SH
(Pembantu Rektor III Universitas Jember)
Drs. Liakip,SU
(Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember)
- Pembina : Drs. Abdul Halim
(Pembantu Dekan III Fakultas Ekonomi Universitas Jember)
Dr. Sarwedi, MM.
(Ketua Jurusan IESP Universitas Jember)
- Dosen Pengarah : Drs. Rafael P.S,Msi
Drs. Bambang Yudono
Teguh Hadi .P, SE, Msi
Drs. M. Adenan, MM
- Penanggung Jawab : Yosi Wihara
(Sekretaris Jenderal IMEPI)
Sri Wahyuningsih
(Ketua HMJ IESP FE Universitas Jember)
- Steering Committee : Luluk Rofiana
Wiwik Jumaida
- Organizing Committee
- | | | |
|---------------|--------------------|----------|
| Ketua OC | : Bambang Dwi Y | (01-429) |
| Sekretaris OC | : Achmad Azizul C | (01-067) |
| Bendahara OC | : Lailatul Mufidah | (01-247) |

Divisi-divisi :

❖ Divisi Kesekretariatan

CO. Evy Kusuma R (02-079)

Anggota : Whelly G.P.M. (01-285)

Susana Hady Suprayitno (03-055)

Terlan Ardhiyani J. (03-240)

Suaibah Ash Hasibuan (03-285)

❖ Divisi Dana Dan Usaha

CO. Dian Kurniawan (01-139)

Anggota : Dwiyana Renantono (01-068)

Des Victoria Yunita (02-266)

terhadap Agiek Adityo S (03-149)

kami ucapka Dessy Muldiana (03-161)

Pramurdianto (03-168)

Parahita Widya A (03-186)

Teguh Susanto (03-247)

Ricco Fanodi (03-269)

❖ Divisi Perlengkapan

Co. A.F. Kursi (02-1063)

Anggota : Jerry Pringgodigdo (02-1064)

Baharuddin Yusuf (02-1275)

Tatin Indrayani (02-1286)

Mahbub Zunaedi (03-1150)

Dwi Nanda (03-1194)

❖ Divisi Akomodasi dan Transportasi

Co. Johar Fatoni (02-1225)

Anggota : Afri Yayadi Y (01-1124)

Dwi Admajayanto (02-1318)

Ferhina Indah (03-1035)

Ludfi Anita Sari (03-1118)

Wisnu Novfanto (03-1364)

Adi Bramanto (01-1228)

- **Susunan Kepanitiaan:**

(Terlampir)

- **Susunan Acara :**

(Terlampir)

PENUTUP


Demikian proposal ini disusun dengan harapan dapat digunakan sebagai gambaran terhadap kegiatan yang akan kami laksanakan. Atas perhatian Bapak/Ibu/Saudara/Saudari kami ucapkan terimakasih.

LEMBAR PENGESAHAN
SEMINAR NASIONAL DAN RAKERNAS II IMEPI
" Keterpurukan Sektor Agribisnis Dan Tantangannya
Dalam Menghadapi Perdagangan Bebas"


HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN IESP
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS JEMBER
Jember, 23 - 27 Mei 2004

Hormat Kami,


Ketua Panitia


BAMBANG DWI Y.

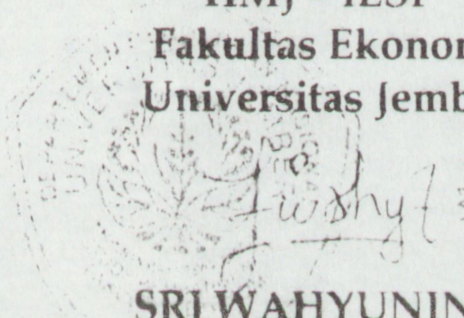
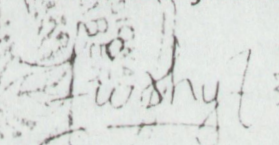
Sekretaris


ACHMAD AZIZUL C

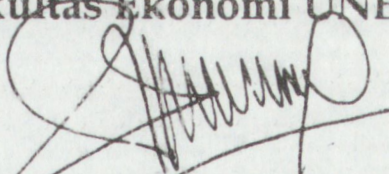
Menyetujui,

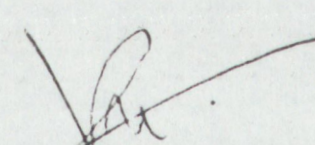
Sekretaris Jenderal
Kawan Mahasiswa Ekonomi
Pembangunan Indonesia


YOSI WIHARA

HMJ - IESP
Fakultas Ekonomi
Universitas Jember


SRI WAHYUNINGSIH

Mengetahui,

Pembantu Dekan III
Fakultas Ekonomi UNEJ

Drs. ABDUL HALIM
NIP. 130 674 838

Ketua Jurusan IESP
Fakultas Ekonomi UNEJ

Dr. SARWEDI
NIP. 131 276 658

Proposal

Seminar Nasional dan Rapat Kerja Nasional II

Ikatan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan Indonesia

Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

Fakultas Ekonomi Universitas Jember

*"Keterpurukan Sektor Agribisnis dan tantangannya
dalam menghadapi perdagangan bebas"*

PENDAHULUAN

I. Seminar Nasional

Pembangunan Nasional pada hakekatnya merupakan proses perubahan yang terjadi secara terus menerus menuju kearah kemajuan dan perbaikan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan pembangunan adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur baik material maupun spiritual berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945. Pembangunan Ekonomi dapat diartikan sebagai proses kegiatan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan taraf hidup masyarakat, sehingga pendapatan perkapita masyarakat dapat meningkat dalam jangka panjang.

Pembangunan sector pertanian merupakan salah satu bagian terpenting yang tidak terpisahkan dalam pembangunan ekonomi dan Pembangunan Nasional. Hal ini disebabkan karena Indonesia merupakan negara Agraris yang memiliki potensi, tetapi kondisi sektor ini semakin terpuruk karena permasalahan struktural, kultural hingga pengaruh perdagangan bebas dan krisis ekonomi. Sehingga sampai saat ini, sektor ini tidak mampu menjadi tulang punggung pembangunan ekonomi bangsa. Konsepsi pembangunan pertanian berorientasi Agribisnis merupakan tumpuan harapan bagi perkembangan sektor pertanian pada masa datang, yang memandang sektor pertanian sebagai satu tantangan. Saat ini, Indonesia dihadapkan pada beberapa tantangan. **Tantangan Pertama**, berkaitan dengan perkembangan

Internasional, yaitu berkaitan dengan Liberalisasi, investasi dan perdagangan. **Tantangan Kedua**, berasal dari Dalam Negeri yang terkait dengan permasalahan struktural, kultural serta kelemahan kompetensi SDM yang antara lain transformasi perekonomian dan politik nasional, kependudukan dan tenaga kerja, kemiskinan, ketahanan pangan, kepemilikan lahan, permodalan dan kendala anggaran pembangunan, dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jika tantangan-tantangan tersebut terus berlangsung tanpa adanya antisipasi yang mendasar, maka permasalahan mendasar yang sifatnya struktural, kultural, termasuk ketidakperdayaan sektor pertanian sebagai basis akan semakin besar. Pertanian sebagai sektor basis semakin terpuruk menjadi residu dari keseluruhan kegiatan ekonomi, yakni terjadinya proses pemiskinan yang semakin cepat dan besar. Oleh karena itu, diperlukan upaya pendekatan mendasar pula yakni bersifat struktural dan kultural.

Perubahan struktural seperti merubah struktur kelembagaan produksi, pasar input dan hasil serta pasca panen. Secara kultural berarti membangun kultur atau budaya yang lebih berorientasi proses bukan hasil termasuk merubah pola pikir, perilaku, sikap, dan sudut pandang pertanian sebagai suatu industri, sehingga bukan semata-mata mendirikan pabrik. Era industrialisasi dimasa yang akan datang bukan hanya milik dunia industri manufaktur, tetapi juga sektor pertanian. Hal ini berarti, proses industrialisasi juga merupakan proses yang transformasi yang berlangsung di sektor pertanian. Sehingga diharapkan dengan diadakannya seminar ini bisa diadakan sarana untuk menyumbangkan pemikiran dari mahasiswa yang memiliki tataran akademis dengan melihat realita yang ada.

II. Rapat Kerja Nasional

Ikatan mahasiswa Ekonomi Pembangunan (IMEPI) adalah suatu organisasi tingkat nasional yang merupakan induk dari organisasi mahasiswa Ekonomi Pembangunan seluruh Indonesia. Eksistensi IMEPI sebagai organisasi mahasiswa yang bersifat visioner diperlukan dalam situasi dan kondisi dewasa ini.

Keberadaan Ikatan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan Indonesia (IMEPI) dalam usia yang relatif masih muda cukup memberikan kontribusi yang besar bagi komunikasi antar perguruan tinggi di Indonesia, khususnya mahasiswa Ekonomi Pembangunan. Dimana IMEPI merupakan wadah penyaluran ide dan pemikiran mahasiswa untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagai wujud nyata pengabdian terhadap bangsa dan negara.

Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan suatu kelembagaan yang ideal dengan latar belakang keilmuan yang mantap dari para anggotanya dan juga untuk menjaga kesinambungan dan keutuhan organisasi, maka perlu dilaksanakan Rapat Kerja Nasional yang membahas tentang keorganisasian IMEPI dan program kerja dari IMEPI.

Berdasarkan ketetapan Kongres II IMEPI yang diadakan di Pontianak menetapkan bahwa Rapat Kerja Nasional II (RAKERNAS II) diselenggarakan di Jember, dan sebagai penyelenggaranya adalah HMJ IESP Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

PELAKSANAAN KEGIATAN

▪ **Nama Kegiatan**

“Seminar Nasional dan Rapat Kerja Nasional II IMEPI”

▪ **Tema Kegiatan**

Melalui Rakernas II IMEPI digunakan sebagai wadah peningkatan profesionalisme IMEPI dan melalui Seminar Nasional kita memperoleh wawasan dan pengetahuan tentang keterpurukan Agribisnis dan tantangan kedepan dalam menghadapi perdagangan bebas.

▪ **Bentuk Kegiatan**

1. Seminar Nasional

Seminar Nasional ini merupakan kegiatan ilmiah yang ditujukan agar peserta mempunyai daya nalar dan memperoleh pengetahuan mengenai keterpurukan sektor Agribisnis dan tantangan yang akan dihadapi dalam perdagangan bebas. Adapun Pembicara yang menjadi narasumber adalah para ahli dan pakar dibidangnya baik dari pusat ataupun daerah.

2. Rapat Kerja Nasional

Kegiatan ini bertujuan untuk memilih dan melantik kepengurusan Ikatan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan Indonesia periode 2004-2005, selain itu pada forum ini akan dirumuskan Program Kerja IMEPI selama 1,5 tahun masa kepengurusan.

▪ **Landasan Kegiatan**

1. Tridarma Perguruan Tinggi
2. AD/ART Ikatan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan Indonesia
3. Program Kerja Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Jember 2003-2004
4. Ketetapan Kongres II IMEPI di Pontianak

▪ **Tujuan Kegiatan**

1. Membentuk dan melantik kepengurusan IMEPI periode 2004-2005
2. Menyusun program kerja IMEPI periode 2004-2005
3. Meningkatkan kemampuan berfikir dan penalaran konsep Ekonomi Pembangunan dalam teori dan praktek
4. Mempererat persaudaraan antar mahasiswa Ekonomi Pembangunan antar Indonesia
5. Sarana penyatuan ide dan gagasan dalam memberikan kontribusi yang mendukung bagi pembangunan ekonomi

▪ **Peserta Kegiatan**

1. Delegasi dari perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta yang terdaftar sebagai anggota IMEPI dan delegasi perguruan tinggi negeri dan swasta yang diundang.
2. Mahasiswa
3. Umum

▪ **Waktu dan Tempat Kegiatan**

Seminar Nasional

Hari : Senin
Tanggal : 24 Mei 2004
Tempat : Aula Rektorat UNEJ

Rakernas II IMEPI

Hari : Selasa - Kamis
Tanggal : 25 - 26 Mei 2004
Tempat : Hotel Rembangan, Jember

